

Urgensi Wirausaha Berjamaah DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI



Dr Lukman M Baga
Kepala Pusat Studi
Bisnis dan Ekonomi
Syariah (CIBEST) IPB

Salah satu permasalahan mendasar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia adalah tidak sehatnya struktur pelaku usaha yang ada. Pada tahun 2011, dari sejumlah 55,17 juta jumlah pelaku usaha, hanya 4.952 (0,01 persen) terkategori sebagai usaha skala besar, dan selebihnya 99,99 persen merupakan UMKM. Ternyata dari 54,56 juta pelaku usaha terkategori UMKM, hanya 602.195 terkategori usaha kecil dan 44.280 usaha menengah.

Kebijakan pengembangan UMKM umumnya diarahkan pada upaya menjadikan para pelaku usaha mampu naik kelas yang diikuti dengan peningkatan produktivitasnya. Hal ini diupayakan melalui peningkatan kemampuan wirausaha yang diikuti dengan pengembangan akses pembiayaan dan akses pasar bagi pelaku UMKM. Namun pada praktiknya tidak mudah dijalankan, khususnya bagi pelaku usaha mikro. Alasan pertama dikarenakan jumlah usaha mikro yang sangat banyak sehingga membutuhkan sumberdaya yang besar untuk mengembangkannya. Alasan kedua dikarenakan adanya hambatan internal para pelaku usaha mikro itu sendiri, dimana pada umumnya tidak memiliki sikap mental seorang pelaku usaha tangguh, yang siap dan mau berkembang. Bahkan tidak jarang diantara mereka yang tidak mau dan bahkan takut untuk berkembang.

Wirausaha individu vs wirausaha berjamaah

Selain konsep wirausaha yang dipahami secara umum (*individual entrepreneur*) terdapat konsep wirausaha berjamaah (*co-operative entrepreneur*). Konsep yang terakhir ini belum banyak dipahami dan dikembangkan masyarakat. Pada dasarnya, untuk dapat meningkatkan produktivitas pelaku usaha mikro, tidak perlu memaksakan mereka untuk masing-masing memiliki jiwa wirausaha. Jiwa wirausaha yang terkait dengan kemampuan menangkap peluang usaha, mengembangkan inovasi dan sekaligus membuka akses pasar. Terdapat mekanisme lain yang lebih mudah, yaitu dengan menghadirkan para *co-operative entrepreneur* di tengah-tengah para pelaku usaha mikro.

Sebagai ilustrasi bisa dikaitkan dengan keutamaan sholat berjamaah. Untuk mendapatkan kebaikan 27 kali lipat, tiap orang tidak harus bisa menjadi imam dalam sholat berjamaah. Cukup satu saja yang bisa menjadi imam, maka seluruh orang yang ikut berjamaah akan mendapatkan 27 derajat kebaikan yang sama. Demikian pula dalam konteks bisnis, untuk mendapat peluang usaha, mengembangkan inovasi dan membuka akses pasar, tidak perlu semua orang harus memiliki kemampuan tersebut. Dibutuhkan minimal satu orang yang mampu memainkan peran wirausaha tersebut, yang selanjutnya peluang bisnis tersebut dikembangkan bersama-sama dengan jamaahnya.

Wirausaha berjamaah dalam praktik

Pada sebuah seminar internasional dengan tema "*The Role of Entrepreneurial Congregation, Strengthening Trade and Economic among Islamic Countries*", yang diselenggarakan di Institut Pertanian Bogor pada tanggal 18 Nopember 2013 lalu, sengaja



Perbedaan Wirausaha Individu dengan Wirausaha Berjamaah (Kasus Sektor Pertanian)

No	Kebutuhan / Orientasi	Wirausaha Individu	Wirausaha Berjamaah
1	Gagasan kreatif/inovatif	V	VV
2	Modal (investasi, modal kerja)	V	-
3	Tenaga Kerja	V	-
4	Lahan	V	-
5	Potensi pengembangan usaha	V	VVVVV
6	Leadership	V	VV
7	Profit/Benefit/Pahala	V	VVVVV

Tabel 1. Perbedaan Wirausaha Individu dengan Wirausaha Berjamaah

dihadirkan seorang pembicara yang merupakan praktisi bisnis florikultur asal Sukabumi. Berbekal pengalaman dua tahun menjadi TKI di Korea Selatan, Wahyudin (kakak dari pembicara tersebut) mengetahui bahwa masyarakat Korea Selatan menyukai tanaman suji (*Dracaena sanderiana*) yang diyakini sebagai pohon hoki. Jenis tanaman ini banyak dijumpai di kampung halamannya yang biasa dijadikan sebagai tanaman pagar.

Sepulangnya dari Korsel, Wahyudin merintis bisnis ekspor tanaman suji ke Korsel. Namun Wahyudin tidak membeli atau menyewa lahan sekian puluh hektar untuk menanam tanaman suji tersebut. Apa yang dilakukan Wahyudin adalah mengembangkan kerjasama dengan dua ribu petani yang tergabung dalam 200 kelompok tani. Para petani menanam suji di lahan mereka masing-masing. Wahyudin melakukan pembinaan bagaimana menjadikan tanaman suji petani menjadi produk yang menarik dan layak ekspor. Tidak ada unsur eksploitasi terhadap petani, dalam artian, petani mendapatkan harga yang baik yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat kesejahteraan hidup mereka. Baik Wahyudin maupun petani, mereka sama-sama menikmati kerjasama bisnis ini bagaikan suatu keluarga besar yang penuh rasa persaudaraan.

Keunggulan wirausaha berjamaah

Paling tidak terapat lima keunggulan dalam menerapkan konsep wirausaha berjamaah dibandingkan wirausaha individual. Pertama, sang wirausaha dapat merealisasikan gagasan bisnisnya dengan skala usaha yang dibutuhkan. Tentunya untuk menjaga kontinuitas produk yang diekspor, Wahyudin memerlukan ketersediaan produk yang banyak, yang tentunya akan sulit jika hanya mengandalkan hasil usaha sendiri. Kedua, sang wirausaha tidak perlu menyediakan dana yang sangat besar untuk investasi dan modal kerja, karena para petani dengan senang hati menyediakan sumberdaya yang dimiliki

baik berupa lahan, tenaga kerja dan modal sebagai kontribusi mereka dalam usaha berjamaah tersebut. Hal ini sangat erat kaitannya dengan distribusi resiko bisnis.

Ketiga, ekspansi usaha akan lebih mudah dilakukan, yaitu dengan mengajak lebih banyak petani untuk bergabung. Keempat, petani mendapatkan kesempatan berusaha yang mendatangkan penghasilan yang lebih baik, karena secara berjamaah mereka dapat memenuhi kebutuhan pasar ekspor yang memberikan tingkat harga yang baik. Kelima, wirausaha berjamaah merupakan bentuk ideal dalam upaya pemberdayaan pelaku usaha mikro, sehingga dimensi manfaat bukan hanya terkait dengan keuntungan finansial yang bersifat duniawi, namun juga berlipatgandanya pahala bagi sang wirausahawan (lihat Tabel 1).

Tantangan ke depan

Pada dasarnya wirausaha berjamaah bukan hanya menguntungkan pelaku usaha mikro, namun sang wirausaha itu sendiri. Saat ini, banyak para sarjana pertanian yang tak mau merasa tidak mampu dan tak percaya diri untuk berwirausaha di pedesaan dengan berbagai alasan seperti; tidak memiliki lahan, tidak punya modal dan tidak sanggup bekerja seharian di alam terbuka. Padahal sebagai seorang yang terdidik, mereka memiliki kemampuan untuk membaca dan

mem-buka akses pasar serta teknologi yang dibutuhkan.

Dalam konsep wirausaha berjamaah, hal tersebut tidak lagi menjadi kendala, karena berbagai kekurangan para sarjana pertanian ini ternyata dimiliki oleh para petani. Sementara petani sangat membutuhkan kemampuan yang dimiliki oleh para sarjana tersebut. Dengan penerapan konsep wirausaha berjamaah, maka kehadiran para sarjana di pedesaan bukan menjadi kompetitor bagi para petani, namun akan menjadi komplekmenter para petani.

Mengingat fakta 54,56 juta pelaku usaha di Indonesia adalah berskala usaha mikro, sementara di sisi lain, Indonesia dikaruniai Allah SWT dengan sumberdaya alam yang sangat besar dan beragam (*mega biodiversity*), maka tantangan ke depan adalah bagaimana konsep wirausaha berjamaah ini dapat terus disosialisasikan dan dikembangkan pada berbagai sektor perekonomian. Untuk itu sosok wirausaha berjamaah ini menjadi sangat penting, dan kehadirannya tidak bisa hanya ditunggu (*by chance*), tapi harus didatangkan secara terprogram (*by design*). Oleh karenanya program kaderisasi *co-operative entrepreneurs* melalui proses pendidikan dan pelatihan yang sistematis dan terarah menjadi suatu hal yang esensial untuk dikembangkan. *Wallahu 'alam.* ■

TSAQOFI

Menguji Efektivitas GRES



Dr Irfan Syaqui Beik
Ketua Prodi Ekonomi
Syariah FEM IPB

Gerakan Ekonomi Syariah atau GRES yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 November 2013 lalu pada dasarnya merupakan simbol penguatan sinergi seluruh sektor dalam ekonomi syariah. Selama ini, ada kesan bahwa setiap sektor dalam ekonomi syariah, seperti sektor keuangan syariah, ZISWAF dan sektor riil (bisnis syariah), berjalan sendiri-sendiri. Belum terlihat adanya kesatuan gerak langkah yang efektif. Melalui GRES diharapkan agar konsolidasi lintas sektor ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga potensi-potensi kekuatan yang selama ini berserakan, dapat diorganisir dan dioptimalkan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara politik, peluncuran GRES merupakan simbol penguatan dukungan pemerintahan Presiden SBY terhadap keberadaan institusi ekonomi syariah. Bahkan Presiden SBY telah mencanangkan tekad untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Dengan melihat realitas yang ada saat ini, ditambah dengan banyaknya potensi yang belum tergalai, maka pernyataan SBY tersebut tentu bukan sekedar basa basi, melainkan bisa kita realisasikan secara nyata.

Tentu saja kita berharap bahwa GRES ini tidak hanya berhenti di deklarasi. Tidak seperti gerakan-gerakan

lain yang hanya terlihat semarak pada saat diluncurkan, namun kemudian tenggelam dan tidak pernah terdengar lagi ke permukaan. Untuk itu, kita perlu membangun sejumlah indikator yang dapat dijadikan sebagai parameter keberhasilan dan efektivitas gerakan ekonomi syariah ini, sehingga kesan sebagai gerakan seremonial" ini bisa dihapuskan.

Menurut Michael Woodford (2005), efektivitas ini dapat dilihat dari dua sisi utama. Pertama, *policy commitment* atau komitmen kebijakan pemerintah, dan yang kedua, *public understanding* atau pemahaman publik terhadap esensi dari suatu gerakan.

Sementara Fauchex (1998) menambahkan faktor *sustainability* atau keberlanjutan dan kontinuitas sebagai indikator keberhasilan. Karena itu, merujuk pada kedua pendapat yang ada, maka paling tidak, efektivitas dan keberhasilan GRES ini harus dilihat dari tiga faktor, yaitu komitmen kebijakan negara, pemahaman dan partisipasi publik, dan keberlanjutan GRES ke depan.

Tiga indikator

Pertama, terkait kebijakan pemerintah. Woodford (2005) menegaskan bahwa komitmen kebijakan ini harus bisa direalisasikan secara nyata di lapangan. Realisasi ini akan menumbuhkan kepercayaan publik bahwa pemerintah memang tidak sekedar berbasasi dengan pencanangan

GRES tersebut. Untuk itu, pemerintah harus segera meluncurkan paket kebijakan yang akan dilakukannya dalam rangka memperkuat posisi ekonomi syariah, dan mengkomunikasikannya kepada publik secara terbuka. Kalau ini tidak dilakukan, maka prosesi seremonial yang telah dilakukan, dapat berbalik "menjatuhkan" citra pemerintah itu sendiri.

Jika melihat kondisi yang ada, sesungguhnya ada banyak kebijakan yang bisa segera diluncurkan. Misalnya, pada sektor ZISWAF, pemerintah dapat mempercepat penerbitan PP (Peraturan Pemerintah) sebagai peraturan pelaksana dari UU No 23/2011, dan kebijakan lainnya, seperti Instruksi Presiden dan Peraturan Menteri terkait, untuk mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat. Kemudian pada sektor keuangan syariah, di samping eksekusi penempatan dana haji di bank syariah, pemerintah juga harus menyempatkan *roadmap* pendirian bank BUMN syariah dan penempatan dana APBN di bank syariah.

Contoh lainnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana menyalurkan sebagian dana PUAP kepada para petani, melalui skema pembiayaan syariah. Kementerian Pertanian dapat mewajibkan, misalnya, se-pertiga dana PUAP tersebut melalui skim syariah. Penulis yakin, ada banyak daerah yang telah siap untuk menerapkan skim syariah tersebut.

Selanjutnya, kedua, penguatan pe-

mahaman publik terhadap ekonomi syariah. Ini dapat dilakukan melalui peningkatan kampanye dan edukasi yang efektif. Regulator, praktisi, dan para asosiasi yang terlibat dalam GRES ini harus bisa merumuskan strategi nasional edukasi publik yang tepat dan efektif. PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam melakukan komunikasi publik, harus dapat meningkatkan peranannya sebagai mediator sekaligus akselerator penyusunan strategi nasional ini. Harus ada tindak lanjut program sosialisasi yang nyata pasca deklarasi GRES.

Pemahaman yang benar akan ekonomi syariah diyakini akan mendorong penguatan komitmen publik untuk mau berekonomi dan berbisnis secara syariah. Keberpihakan publik yang lebih besar, akan berdampak pada penguatan posisi Indonesia dalam konstelasi ekonomi syariah dunia.

Ketiga, seluruh *stakeholder* ekonomi syariah yang ada, harus mampu menjaga stamina untuk menjaga keberlanjutan dari gerakan ini. Hal ini dimaksudkan agar gerakan ini tidak bersifat temporal dan jangka pendek, melainkan akan terus membesar dan semakin kuat, baik di level negara maupun di level *grass root*.

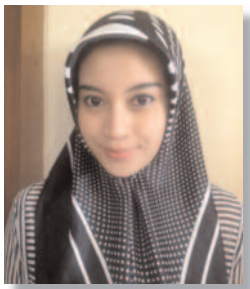
Insy Allah, jika ini dapat dilakukan, maka cita-cita untuk menjadi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia, akan menjadi kenyataan. *Wallahu 'alam.* ■

Efisiensi Model BMT Vs Koperasi



Ascarya

Peneliti Senior Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES), Bank Indonesia dan Peneliti Tamu FEM IPB



Adinda R N Illiyyin

Asisten Peneliti pada Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES), Bank Indonesia

BMT adalah LKM Syariah (LKMS) yang merupakan kombinasi dari LKM dan keuangan Syariah, sehingga ia memiliki karakteristik dan model dasar seperti mainstream LKM (koperasi), namun memiliki cara kerja, produk dan jasa yang sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan. Karakteristik khusus lain yang melekat pada BMT adalah pemberdayaan yang dimaksudkan untuk memberikan bekal kepada nasabah (*bottom of the triangle* atau golongan termiskin) agar dapat berkarya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan, karena LKMS adalah salah satu pendekatan untuk membasmi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan antara golongan umat kaya dan golongan umat miskin.

Dengan besarnya porsi usaha mikro dan tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia (populasi rakyat Indonesia yang berpenghasilan dibawah \$2 per hari mencapai 43,3 persen di tahun 2011), peranan LKM konvensional (koperasi) dan LKM Syariah (BMT) menjadi sangat penting. LKM harus dapat menyediakan produk dan jasa keuangan mikro yang sesuai dengan kebutuhan usaha mikro maupun umat miskin. Untuk dapat memberikan pelayanan keuangan yang prima dan dapat memberdayakan umat miskin, LKM harus dapat bekerja secara efektif, efisien dan berkelanjutan dengan model yang sesuai.

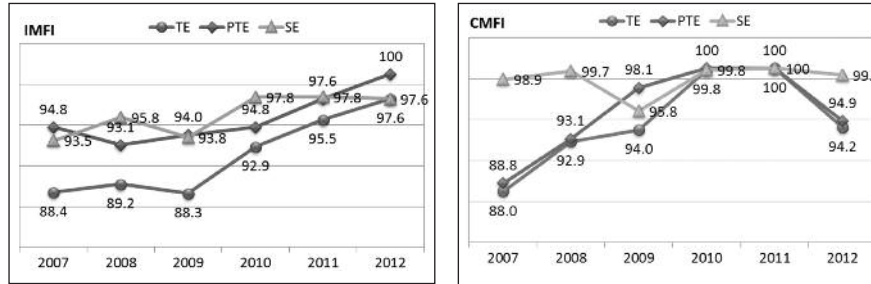
Kajian singkat ini dimaksudkan untuk menganalisis efisiensi teknis beberapa model koperasi dan BMT terkemuka di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) untuk dapat mengetahui kondisi efisiensi saat ini dan aspek-aspek kekurangannya sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan dimasa yang akan datang.

Data

Sesuai dengan pendekatan DEA, data yang digunakan berupa data tahunan 2007-2012 yang bersumber dari laporan neraca dan rugi laba serta data jumlah karyawan. Variabel input meliputi: 1) Aset Tetap; 2) Jumlah Karyawan; 3) Simpanan; 4) Pembiayaan Bank; dan 5) Modal Anggota. Variabel output meliputi: 1) Pembiayaan; dan 2) Pendapatan lainnya. Koperasi dan BMT yang dijadikan sampel dalam kajian ini adalah lima koperasi besar dan lima BMT besar di Indonesia, seperti dalam tabel 1.

Model Grameen adalah LKM yang menerapkan sistem kelompok dengan jaminan tanggung renteng untuk anggotanya saja, yang mayoritas wanita, dan bertujuan memberdayakan umat miskin. Model Individual adalah LKM yang memberikan pelayanan kepada individu anggotanya saja. Sedangkan, model Bank Mikro adalah LKM yang memberikan pelay-

MODEL	KOPERASI	BMT
Grameen	KOMIDA	BMT ITQAN
	MBK VENTURA	
	SETIA BHAKTI WANITA	
Individual	KODANUA	BMT MARDLOTILLAH
		BMT IBADURRAHMAN
Bank Mikro	KOSPIN JASA	KOSPIN JASA SYARIAH
		BMT UGT SIDOGIRI



Gambar 1. Efisiensi BMT (Kiri) dan Koperasi (Kanan)

anan individu kepada anggota dan bukan anggota (yang biasa disebut calon anggota).

Hasil kajian

Metode DEA menghasilkan tiga ukuran efisiensi, yaitu Efisiensi Teknis (Technical Efficiency-TE), Efisiensi Teknis Murni (Pure Technical Efficiency-PTE), dan Efisiensi Skala (Scale Efficiency-SE), dimana TE adalah hasil perkalian dari PTE dan SE.

PTE BMT mencapai 94,8 persen di tahun 2007 yang kemudian sedikit menurun di tahun 2008-2009 dan akhirnya meningkat terus di tahun 2010-2012 hingga mencapai 100 persen di tahun 2012 (lihat PTE gambar 1, kiri). PTE Koperasi meningkat terus dari 88,8 persen di tahun 2007 hingga mencapai 100 persen di tahun 2010-2011, dan akhirnya menurun menjadi 94,9 persen di tahun 2012 (lihat PTE gambar 1, kanan).

SE BMT secara umum meningkat sedikit demi sedikit dari 93,5 persen di tahun 2007 menjadi 97,6 persen di tahun 2012, dan terlihat sedikit menurun di tahun 2009 (lihat SE gambar 1, kiri). SE Koperasi secara umum stabil dari 98,9 persen di tahun 2007 menjadi 99,3 persen di tahun 2012, dan terlihat menurun lebih banyak dibanding BMT di tahun 2009 (lihat SE gambar 1, kanan).

TE BMT di tahun 2007-2009 mengalami stagnasi di sekitar 88 persen, namun kemudian meningkat terus di tahun 2010-2012 hingga mencapai 97,6 persen di tahun 2012 (lihat TE gambar 1, kiri). Naikannya efisiensi TE BMT utamanya didukung oleh kenaikan PTE-nya. Sementara itu TE Koperasi meningkat terus dari 88 persen di tahun 2007 hingga mencapai

100 persen di tahun 2010 dan 2011. Namun demikian TE Koperasi menurun di tahun 2012 menjadi 94,2 persen (lihat TE gambar 1, kanan). Naik turunnya TE koperasi merupakan kontribusi dari pergerakan PTE. Angka-angka TE tersebut menunjukkan koperasi lebih efisien dari pada BMT di tahun-tahun awal, namun di akhir tahun 2012 BMT menjadi lebih efisien dibandingkan koperasi.

Di tahun 2007-2009 BMT memiliki banyak kelemahan terutama pada faktor karyawan dan aset tetap. Namun, di akhir tahun 2012 kelemahan BMT bergeser pada faktor pembiayaan bank dan modal anggota. Pembiayaan bank masih menjadi sumber utama pendanaan karena BMT masih mengalami kesulitan dalam menggalang dana simpanan dari anggota yang mayoritas umat miskin. Selain itu, BMT juga harus menjaga likuiditasnya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terutama ketika mereka mengambil dana simpanan pada masa-masa tertentu (tahun ajaran baru dan bulan Ramadhan). Modal anggota BMT yang belum efisien justru menunjukkan tingkat pengembalian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota yang cukup besar.

Sementara itu, koperasi juga memiliki banyak kelemahan di tahun 2007-2009 meliputi faktor karyawan, aset tetap, pembiayaan bank, modal anggota, dan pendapatan lainnya. Namun, di akhir tahun 2012 faktor-faktor kelemahan koperasi berkurang menjadi faktor aset tetap, modal anggota dan pendapatan lainnya saja. Kelemahan faktor Aset Tetap dikarenakan banyak koperasi yang memiliki aset mewah (misalnya gedung mewah). Modal Anggota koperasi yang belum efi-

sien juga menunjukkan tingkat SHU kepada anggota yang cukup besar. Selain itu, Pendapatan Lainnya yang belum efisien disebabkan koperasi masih belum banyak menawarkan variasi jasa keuangan kepada anggotanya.

Analisis

Dari ketiga model LKM, model Grameen (konvensional maupun Syariah) menunjukkan kinerja yang lebih baik dari model Individual maupun model Bank Mikro. Hal ini disebabkan karena pembiayaan yang diberikan bernominal kecil namun banyak kepada semua anggotanya, sehingga tingkat risiko sangat rendah dan tingkat kecemasan pembiayaan (NPF atau PAR) sangat kecil. Kelemahan model Grameen adalah faktor simpanan, dimana semua anggotanya merupakan umat miskin yang tingkat simpanannya kecil, sehingga model Grameen sangat tergantung pada sumber dana dari pihak lain (faktor pembiayaan bank) yang mahal. Selain itu, model Grameen memfokuskan usahanya pada penyaluran pembiayaan dan belum mengembangkan produk-produk jasa keuangan lainnya.

Model Individual mempunyai keunggulan karakteristik seperti model Grameen karena seluruh penyimpan, peminjam dan pengguna layanan LKM merupakan anggota LKM tersebut, sehingga segala manfaat (termasuk SHU) akan kembali lagi kepada anggota. Namun demikian tingkat risiko menjadi lebih tinggi dan tingkat kecemasan pembiayaan berpotensi lebih tinggi dari model Grameen. Dilema dalam model Individual adalah bahwa ia berpotensi mengerahkan dana dari masyarakat luas namun terkendala oleh tingkat kepercayaan yang rendah terhadap BMT maupun koperasi untuk menyimpan dananya, sehingga hanya model Individual yang terpercaya yang dapat mengumpulkan dana murah dari masyarakat. Model Bank Mikro mempunyai keunggulan jaringan yang luas, besar dan terpercaya sehingga dapat mengumpulkan dana murah dari masyarakat. Sifat pembiayaan kepada individu dengan jumlah nominal yang lebih besar berpotensi meningkatkan risiko dan kecemasan pembiayaan (terutama kepada yang bukan anggota). Untuk menjaga kinerja dan kesinambungannya, model Bank Mikro harus memiliki model bisnis yang baik.

Dapat disimpulkan bahwa setiap model LKM memiliki karakteristik, segmen pasar, dan model bisnis masing-masing yang dibutuhkan oleh berbagai lapisan umat miskin dan usaha mikro. Perbedaan yang mendasar dan beragamnya variasi dari setiap model membuat kinerja masing-masing model menjadi unik dan tidak tepat untuk dibandingkan secara langsung. Untuk menjaga kinerja dan kesinambungannya, setiap model LKM harus dipraktekkan secara khusus sesuai karakteristiknya. *Wallahu a'lam.* ■

TAMKINIA



Rina Murniati

Mahasiswa S1 Ilmu Ekonomi FEM IPB dan Asisten Peneliti pada Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah IPB

Pengaruh Zakat Terhadap IPM

Zakat merupakan instrumen penting dalam pembangunan manusia, khususnya di negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim seperti Indonesia. Potensi zakat Indonesia berdasarkan hasil survei badan amal zakat (BAZNAS) bersama IPB dan IRTI-IDB pada tahun 2011 menemukan bahwa potensi zakat nasional mencapai Rp 217,3 triliun. Meskipun realisasinya hanya sekitar satu persen, namun setidaknya dana zakat tersebut dapat membantu lebih dari satu juta mustahik setiap tahunnya (BAZNAS 2013).

Peran zakat dalam pembangunan manusia dapat diukur dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari tiga komponen. Komponen IPM meliputi indeks angka harapan hidup yang merepresentasikan kesehatan, indeks pendidikan yang merepresentasikan tingkat pengetahuan, dan indeks daya beli yang merepresentasikan standar hidup layak. Hasil laporan UNDP tahun 2013 menunjukkan bahwa IPM Indonesia mengalami peningkatan dari sebelumnya, tahun 2012 menduduki peringkat 124 sekarang naik tiga peringkat menjadi peringkat 121 dari 187 negara. Jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka nilai IPM ini masih tergolong rendah.

Pembangunan manusia

Saat ini, hampir semua negara memandang keberhasilan pembangunan dari peningkatan pendapatan perkapita, PDB atau pun PNB. Padahal penekanan pada peningkatan PDB dan PNB tanpa memerhatikan penambahan jumlah penduduk memungkinkan terjadinya kekeliruan dalam memahami prestasi kegiatan ekonomi. Karena pada saat perhitungan kenaikan GDP dan GNP, suatu negara juga mengalami pertumbuhan penduduk. Untuk itu, seharusnya pembangunan tidak hanya fokus pada peningkatan indikator ekonomi, namun juga harus memerhatikan dimensi lain dari pembangunan yaitu sumber daya manusia. Hal ini sesuai dengan pernyataan Soedjatmoko (1995), bahwa pembangunan hanya akan terlihat seutuhnya

KOMPONEN	IPM NILAI	INDEKS
Indeks angka harapan hidup	0.34	34
Indeks Pendidikan Rata lama sekolah	0.53	53 4.2 tahun 73 persen
Tingkat melek huruf		
Indeks paritas daya beli (PPP) tanpa zakat	0.53	53
Indeks paritas daya beli (PPP) dengan zakat	0.59	59
IPM sebelum distribusi zakat	0.47	47
IPM setelah distribusi zakat	0.49	49
Perubahan IPM (%)	4.1	

apabila pembangunan itu merupakan proses pembangunan manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur peran zakat dalam pembangunan manusia dengan menggunakan estimasi nilai komponen-komponen IPM tingkat individu. Sampel yang digunakan adalah mustahik program pendayagunaan zakat BAZNAS Kota Bogor yang terhimpun dalam program inovasi kesehatan dan kemanusiaan. Teknik pengambilan data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara langsung kepada mustahik. Sampel yang digunakan sebanyak 60 orang mustahik yang terdiri dari 30 orang mustahik program kesehatan sub program aktivitas klinik dan 30 orang mustahik program kemanusiaan sub program paket senyum.

Latar belakang pengambilan sampel ini didasari oleh prestasi BAZNAS Kota Bogor dalam pendistribusian zakat dan inovasi program. Terbukti dari dinobatkannya BAZNAS Kota Bogor sebagai BAZ Kota/Kabupaten terbaik tingkat nasional tahun 2009 untuk kategori Kreativitas Program Pendayagunaan versi BAZNAS dan pada tahun 2009 mendapat peringkat dua sebagai BAZ Kota/Kabupaten terbaik versi *Islamic Social Responsibility*.

Analisis nilai IPM per komponen

Nilai IPM diperoleh dengan mengabungkan tiga nilai indeks yang terdiri

TABEL 2. KLASIFIKASI NILAI IPM MENURUT STATUSNYA

TINGKATAN STATUS	KRITERIA
Rendah	IPM < 50
Menengah bawah	50 IPM < 66
Menengah atas	66 IPM < 80
Tinggi	IPM 80

dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks daya beli. Indeks harapan hidup diperoleh dengan membagi nilai selisih indeks harapan hidup saat individu lahir dan harapan hidup minimum yang terdapat di UNDP dan selisih harapan hidup minimum dan maksimum yang terdapat pada UNDP.

Indeks pendidikan diperoleh dengan menghitung angka rata-rata lama sekolah dan tingkat melek huruf mustahik. Indeks daya beli diperoleh dengan menghitung nilai *purchasing power parity* (PPP) yang disesuaikan terlebih dahulu, selanjutnya nilai PPP (Xij) di masukkan ke dalam perhitungan indeks daya beli. Setelah diperoleh tiga nilai komponen tersebut, maka langkah akhir adalah menghitung nilai IPM, dimana nilai IPM merupakan agregasi dari ketiga indeks yang telah dihitung, dengan bobot masing-masing yang sama, yaitu sepertiga.

Hasil uji estimasi nilai IPM beserta komponennya menunjukkan bahwa nilai IPM mustahik sebelum dan setelah distribusi zakat berada pada tingkatan rendah. Sebelum distribusi zakat IPM mustahik sebesar 47 dan setelah distribusi zakat naik menjadi 49. Perubahan nilai IPM setelah distribusi zakat sebesar 4.1 persen. Artinya distribusi zakat dari program pendayagunaan zakat oleh BAZ Kota Bogor hanya sedikit mempengaruhi nilai IPM mustahik.

Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor seperti pengaruh nilai komponen-komponen IPM itu sendiri. Nilai indeks harapan hidup adalah sebesar 34. Artinya rata-rata kemungkinan banyak tahun yang ditempuh oleh mustahik ketika ia lahir adalah selama 34 tahun. Namun faktanya, rata-rata usia mustahik lebih dari 34 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa indeks harapan hidup belum bisa dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di bidang kesehatan. Nilai indeks pendidikan adalah sebesar 53 dengan rincian rata-rata lama sekolah 4,2 tahun dan tingkat melek huruf 73 persen. Artinya rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh mustahik usia 15 tahun ke atas dalam menempuh semua jenis pendidikan formal adalah sebesar 4,2 tahun dan terdapat 27 persen mustahik yang berumur di atas 15 tahun tidak bisa baca tulis.

Nilai indeks daya beli *mustahik* sebelum distribusi zakat adalah sebesar 53. Sedangkan setelah distribusi zakat indeks daya beli *mustahik* naik menjadi 59. Persentase perubahannya sebesar 10,2 persen. Artinya pendistribusian zakat oleh BAZ Kota Bogor mampu menaikkan daya beli masyarakat sebesar 10,2 persen.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa distribusi zakat oleh BAZNAS Kota Bogor berperan dalam pembangunan manusia dengan meningkatkan nilai IPM mustahik. Agar peningkatan nilai IPM lebih tinggi, maka diperlukan dukungan kebijakan Negara. Kita berharap pemerintah lebih serius mengupayakan agar realisasi dana zakat lebih besar dari saat ini. *Wallahu a'lam.* ■

APA YANG MENDORONG PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA? Studi Kasus Malaysia



Qurroh Ayuiniyah
Alumnus IE FEM IPB dan IJU Malaysia, Asisten Peneliti pada Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

Islam merupakan agama yang bersifat *syumuliyah*. Ia mencakup semua aspek kehidupan umat manusia, sehingga ia haruslah menjadi *manhajjul hayyah* (kurikulum kehidupan) sebagai pedoman dan kerangka utama di dalam sistem nilai kehidupan. Dalam konteks ini, Islam tidak hanya agama yang berbasiskan moral dan etika, tetapi lebih daripada itu, ia pun merupakan sebuah sistem operasional yang berlaku dan sangat implementatif di dalam aktivitas kehidupan manusia.

Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam pun mengajarkan tentang produktivitas tenaga kerja dan sangat menganjurkan umatnya untuk menjadi pribadi yang produktif. Hal ini sejalan dengan firman-Nya di dalam QS At-Taubah (9) ayat 105 dan QS. Al-Mulk (67) ayat 15.

Dari kedua ayat tersebut, sangat jelas tergambar bahwa Allah SWT mewajibkan orang-orang yang beriman untuk bekerja dan menjadi pribadi yang produktif. Karenanya, di dalam Islam, bekerja dianggap sebagai bagian dari beribadah kepada-Nya. Bahkan di dalam hidupnya, Rasulullah SAW selalu berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, menyia-nyiaakan usia, dan sifat kikir, Aku pun berlindung kepada-Mu dari siksa kubur dan fitnah kehidupan dan kematian." (HR. Shahih Muslim)

Dilihat dari konteks perekonomian, tenaga kerja merupakan salah satu aspek terpenting di dalam dunia kerja. Ia merupakan sumber kreativitas, dasar ide, basis pengetahuan, dan pembentukan inovasi. Dapat dikatakan bahwa tenaga kerja merupakan inti dari kegiatan ekonomi, pembangunan, dan peradaban. Dalam hal ini, tenaga kerja sangat vital di dalam perekonomian suatu negara hanya jika terasosiasi dengan kompetensi, pengetahuan, *skill*, serta kecakapan (Rahman, 2009). Semakin baik kualitas tenaga kerja yang tercermin melalui produktivitas tenaga kerja, semakin baik pula kinerja perekonomian. Bahkan, produktivitas tenaga kerja dapat menurunkan tingkat kemiskinan di suatu negara (Durya dan Pages, 2002).

Contoh dari peran produktivitas tenaga kerja di sektor manufaktur dibuktikan survey yang dilakukan oleh perusahaan Kronos Inc, Amerika Serikat. Survey tersebut menunjukkan bahwa dari sebelas negara

TABEL 1. HASIL KAUSALITAS TODA-YAMAMOTO	
Null Hypothesis Wald Statistik Panel A: Pendidikan LEDU tidak menyebabkan LLAP LLAP tidak menyebabkan LEDU	13,10897 [0,0108]* 2,870410 [0,5797]
Panel B: Kesehatan LHEALTH tidak menyebabkan LLAP LLAP tidak menyebabkan LHEALTH	15,46032 [0,0038]* 7,813861 [0,0986]*
Panel C: Komunikasi LCOM tidak menyebabkan LLAP LLAP tidak menyebabkan LCOM	10,12260 [0,0384]* 1,784116 [0,7754]
Panel D: Transportasi LTRANS tidak menyebabkan LLAP LLAP tidak menyebabkan LTRANS	7,392528 [0,1165] 2,058387 [0,7250]
Panel E: Formasi Modal Tetap Bruto LGFCF tidak menyebabkan LLAP LLAP tidak menyebabkan LGFCF	15,43642 [0,0039]* 4,288951 [0,3683]

Catatan: * mendenotasikan tolak Null Hypothesis

yang diteliti, produktivitas tenaga kerja berada di peringkat pertama sebagai faktor yang paling penting di dalam menentukan kesuksesan industri manufaktur.

Di antara negara-negara yang tergabung di dalam *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), Malaysia merupakan negara yang memiliki pertumbuhan produktivitas paling tinggi pada tahun 2010. Pertumbuhan produktivitas di Malaysia mencapai 5,8 persen, sedangkan negara-negara OECD hanya 2,8 persen (*Productivity Report*, 2010). Di sisi lain, di antara beberapa negara di Asia, pertumbuhan produktivitas Malaysia masih lebih rendah daripada Singapura (11,78 persen), Cina (9,97 persen), Taiwan (8,23 persen), India (6,65 persen), Hong Kong (5,95 persen), dan Thailand (5,94 persen).

Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja di Malaysia selama tahun 1971 hingga 2011 yang tertinggi dicapai pada periode tahun 1991 hingga 1995 yang mencapai angka 5,67 persen. Angka tersebut kemudian turun drastis ke angka 1,52 persen pada periode 1996 hingga 2000, karena pada periode tersebut terjadi krisis moneter 1998 yang melanda negar-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pertumbuhan rata-rata produktivitas tenaga kerja per tahun di Malaysia adalah 2,99 persen. Jika dilihat pada Tabel 2, semakin tinggi pertumbuhan produktivitas tenaga

kerja, semakin besar pula pertumbuhan GDP riil di Malaysia. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi salah satunya didukung oleh produktivitas tenaga kerja.

Melihat peran yang begitu penting dari produktivitas tenaga kerja, maka penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang menentukan produktivitas tenaga kerja dengan studi kasus negara Malaysia dari tahun 1970 hingga 2011. Secara khusus, penelitian ini akan melihat peran dari pendidikan, kesehatan, komunikasi, transportasi, dan formasi modal tetap bruto dari sisi pengeluaran pemerintah terhadap produktivitas tenaga kerja.

Metode dan hasil penelitian

Salah satu cara untuk menjelaskan hubungan kausalitas di antara beberapa variabel adalah teknik Toda-Yamamoto (Toda dan Yamamoto, 1995). Tidak seperti teknik kausalitas Granger, metode ini tidak mensyaratkan pre-testing seperti tes *unit root* and peringkat kointegrasi, sehingga hasilnya tidak tergantung kepada tes preliminary yang dapat menghasilkan output yang bias. Toda dan Yamamoto (1995) merekomendasikan sebuah metode yang simpel di dalam mengestimasi penambahan VAR, meski terdapat kointegrasi, yang menjamin distribusi asimtotik dari statistik Wald. Teknik ini menggunakan *Wald test statistic* untuk menguji restriksi linear pada koefisien dari model VAR

tidak teretriksi dengan order P.

Dari hasil kausalitas Toda-Yamamoto, diketahui panjang lag *k* yang didapat adalah 4, sedangkan *d* yang didapat adalah 1. Selanjutnya, kita dapat menentukan nilai order VAR ke (*k+d*) yaitu 5 dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil dari kausalitas Toda-Yamamoto dapat dilihat di Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, tes kausalitas Toda-Yamamoto menunjukkan bahwa terdapat empat variabel yang signifikan di dalam memiliki hubungan kausalitas dengan produktivitas tenaga kerja, yaitu pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan formasi modal tetap bruto. Hal ini dikarenakan nilai probabilitas Wald statistik kurang dari 10 persen sehingga tolak H_0 dan simpulkan bahwa keempat variabel tersebut menyebabkan produktivitas tenaga kerja.

Hubungan ini bersifat satu arah, dimana pendidikan, komunikasi, dan formasi modal tetap bruto menyebabkan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Sedangkan kesehatan memiliki hubungan dua arah dengan produktivitas tenaga kerja, yaitu selain kesehatan yang menyebabkan produktivitas tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja pun menyebabkan kesehatan bagi tenaga kerja itu sendiri.

Satu-satunya variabel yang tidak memiliki hubungan kausalitas dengan produktivitas tenaga kerja adalah transportasi dikarenakan nilai probabilitas dari Wald statistik lebih besar daripada 10 persen. Dari hasil penelitian ini, kita dapat melihat bahwa investasi dalam sumber daya manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan komunikasi lebih berpengaruh di dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja di dalam perekonomian.

Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan formasi modal tetap bruto memiliki hubungan kausalitas dengan produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, peran pemerintah di dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara membuat strategi planning pendidikan yang efektif, penyediaan akses dan fasilitas kesehatan dengan baik yang dapat dijangkau oleh masyarakat, akses komunikasi yang lebih mudah, serta peningkatan formasi modal tetap bruto yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. *Wallahu a'lam.* ■

BUKAN TAFSIR

Ekonomi Syariah dan Pembangunan Berkelanjutan



Dr Iman Sugema
Dosen IE FEM IPB



M Iqbal Irfany
Dosen IE-FEM IPB

Diskursus akademik maupun media internasional saat ini mempertanyakan bagaimana peranan agama dalam pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan berkelanjutan sendiri didefinisikan sebagai proses pembangunan multidimensi yang bertujuan mencari keseimbangan antara ekonomi-kesejahteraan sosial di satu sisi dan kelestarian lingkungan di sisi lain. Niscaya manusia menggunakan sumberdaya secara bertanggungjawab dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan.

Dari tiga pilar *sustainable development* yang meliputi pertumbuhan, pemerataan/ keadilan pembangunan (*equity*), dan lingkungan (*environment*), sudah banyak dibahas dua hal yang pertama namun masih sedikit yang mengulas posisi dan peran ekonomi syariah terhadap isu-isu lingkungan.

Pendapat skeptis beranggapan tidak ada korelasi antara agama dan isu lingkungan. Degradasi lingkungan yang terjadi lebih dikarenakan dampak negatif dari paradigma pembangunan ekonomi dan gaya hidup modern yang mendominasi alam. Pandangan ini berpendapat bahwa isu lingkungan dapat dikontrol dengan implementasi teknologi hijau, kontrol pertumbuhan populasi, dan meningkatkan kepedulian lingkungan. Terlalu jauh meletakkan agama sebagai solusi.

Sebaliknya, argumen lain menyatakan bahwa justru peranan moralitas dan spiritualitas sangat diperlukan sebagai pengingat akan kerusakan lingkungan. Dalam proses mitigasi degradasi

lingkungan, termasuk isu pemanasan global (*climate change*), banyak pihak seakan 'putus asa' bila degradasi lingkungan hanya ditanggulangi via paradigma teknikal saja sambil dan menagih kontribusi peranan agama sebagai salah satu benteng moral.

Beberapa tahun ini bahkan telah ada deklarasi antarkeyakinan terkait isu perubahan iklim (*Interfaith Declaration on Climate Change*), dimana forum para pemuka berbagai agama secara reguler hadir dalam forum isu-isu lingkungan. Di negara maju, para pemuka agama bahkan mulai mengungus gerakan semisal "green religion" atau "eco-theology" yang mengkampanyekan penggunaan energi ramah lingkungan (*clean energy*) dan gerakan hemat berkonsumsi.

Secara moral pengait ekonomi syariah mestinya lebih bersahabat dengan lingkungan karena dalam ajaran agama sendiri mengharuskan perlunya keseimbangan alam. Pertama, setiap aktifitas harus berpijak pada pencapaian *maqashid syariah* yakni: menjaga keyakinan (*hifdz al-din*), memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-aql*), menjaga keberlangsungan generasi (*hifdz al-nasl*), dan memelihara harta benda (*hifdz al-mal*). Memelihara alam (*hifdz al-alam*) tentu merupakan konsekuensi sejajar yang harus dilakukan dalam menegakkan kemashlahatan agama dan dunia tersebut.

Sistem ekonomi konvensional hanya menempatkan kebutuhan manusia dalam berkonsumsi di atas segalanya dan sumber daya (alam) lebih dipandang sebagai "barang bebas" dalam kerangka eksploitatif. Sebaliknya, prinsip

syariah berpandangan lebih 'hijau' karena menempatkan manusia sebagai khalifah alam semesta dimana dalam melakukan aktifitasnya harus memastikan ketiadaan kerugian akibat eksploitasi berlebih. Manusia adalah khalifah Tuhan di muka bumi dan mereka diperbolehkan mengambil manfaat dari sumberdaya alam tanpa seandainya berperilaku superior.

Dengan kata lain, tujuan *sustainable development* sangat sejalan dengan tujuan dengan ajaran agama, yang menghindari pemborosan (*mubadzir*), mengikis perilaku monopoli, korupsi, mempromosikan kelestarian dan keseimbangan sumberdaya alam, dan hak-hak generasi mendatang.

Kedua, konsekuensi dari pertama, semua aktifitas ekonomi harus mencerminkan prinsip-prinsip syariah. Ajaran agama memandang bahwa pengembangan dan penjagaan alam adalah bagian dari ajaran agama, bukanlah pilihan.

Terdapat banyak instrumen syariah terkait kelestarian lingkungan. Dalam pengelolaan lahan misalnya dikenal istilah *ihya al-mawat*, yakni memproduksi lahan terlantar (ruang kosong), disertai disinsentif/insentif bagi yang tidak berproduksi apalagi digunakan untuk investasi/spekulasi.

Ada pula konsep *hima* yakni kawasan yang dilindungi demi kemashlahatan umum dan habitat hewan/tumbuhan. Ada zona *harim* (kawasan terlarang) dimana tak diperbolehkan ada kegiatan lain yang mengganggu atau mengurangi fungsi utama kawasan itu, misalnya kawasan

aliran/resapan air.

Ada pula konsep *ijarah* yakni bisa menyewakan lahan publik untuk pertanian, bukan memperjualbelikannya. Ada pula *waqaf* yakni lahan swasta yang kemudian dihibahkan untuk kepentingan masyarakat umum.

Tak hanya sebatas itu, urgensi konservasi lingkungan yang semakin luas dan kompleks mengharuskan ijtihad dari berbagai referensi syariat untuk diadaptasi ke dalam berbagai bentuk instrumen konservasi alam di berbagai bidang. Pada prinsipnya, segala aktifitas harus disertai keharusan menjaga kesinambungan dan kelestarian sumberdayanya demi bagi kepentingan masyarakat umum, kesinambungan antar generasi, dan kepentingan ekologi, termasuk hewan dan tumbuhan.

Demikian halnya aspek tidak langsung misalnya pembiayaan investasi, tentu juga tidak lepas dari prinsip-prinsip di atas. Keuangan syariah tentu perlu menginisiasi pembiayaan "hijau" seperti pembangunan pembangkit energi hidro, pembiayaan proyek ramah lingkungan, dan sebagainya. Jadi "hijau" di sini tak melulu terkait perkebunan, pertanian, atau tanam pohon lainnya.

Perbankan diharuskan memiliki indikator-indikator 'hijau' yang lebih jelas dan terukur dalam menilai proyek pembiayaan. Tentu perusahaan lingkungan tentu bisa dirunut dari siapa yang membiayainya. Dari sini, kasus degradasi lingkungan yang menimpa satu proyek 'kotor' yang memperoleh pembiayaan suatu bank tentu dapat merusak kredibilitas, reputasi, bahkan sustainabilitas bank itu sendiri.

Mekanisme *screening* (dan monitoring) pembiayaan syariah mesti menetapkan list-list usaha yang tidak boleh dibiayai. Sepadan dengan larangan berinvestasi di sektor-sektor yang diharamkan seperti alkohol, babi, judi, berinvestasi dalam proyek-proyek yang membahayakan kelestarian lingkungan juga sama dilarangnya.

Akhirnya inisiasi substansi nilai agama dalam implementasi hukum positif diperlukan dari pemerintah. Peranan tokoh agama adalah penting tak hanya memberi inspirasi tapi juga memberi pemahaman akan kewajiban menjaga lingkungan. Bahasa agama memang memiliki peringatan moral yang lebih kuat disertai peringatan akan konsekuensi atas pengabaian-pernyataan. Peringatan ustadz atau kyai terkait menyatakan keharusan merusak lingkungan boleh jadi lebih didengar daripada politisi.

Dari sisi praktisi syariah, walaupun masih banyak perbankkan yang masih enggan dan segan terlibat dalam pembiayaan 'hijau', bank syariah justru harus menjadi pionir menyalurkan pembiayaan peduli lingkungan.

Terakhir, sabda Nabi (riwayat Bukhari-Muslim) mengingatkan bahwa "seisi bumi bisa dijadikan tempat shalat dan suci". Pesan utamanya menyatakan bahwa kita boleh mengerjakan ibadah di tempat manapun selagi suci dan tidak dilarang syariat, namun pesan tersiratnya boleh jadi adalah bahwa kedudukan seisi alam ini adalah suci sehingga kewajiban manusia dalam memelihara dan tidak merusaknya. Dan praktisi syariah harus bisa di garda terdepan. *Wallahu a'lam.* ■